

**RESPON JEPANG TERHADAP PENINGKATAN MILITER CINA PADA
TAHUN 2014 - 2022**

(Skripsi)

Oleh

**PIO DASMARA GEMINTANG
NPM 1616071030**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

RESPON JEPANG TERHADAP PENINGKATAN MILITER CINA PADA TAHUN 2014 - 2022

Oleh

PIO DASMARA GEMINTANG

Jepang dan Cina memiliki sejarah panjang, dimana Jepang pernah berperang dan menjajah Cina di awal imperialisme Jepang. Kedua negara akhirnya berdamai, akan tetapi perdamaian tersebut perlahan-lahan mengalami peregangan. Cina membangun kekuatan militernya, dan pembangunan tersebut menimbulkan ketegangan dikarenakan tindakan Cina dalam menunjukkan kekuatannya. Cina berulang kali melanggar batas wilayah negara lain, mengklaim pulau-pulau hingga seluruh Laut Selatan. Tindakan tersebut menyebabkan Jepang yang berorientasi damai untuk mengadakan interpretasi kembali Artikel 9, peraturan yang mengatur kedudukan Jepang sebagai negara pasifis. Jepang juga membangun kekuatan militernya, dan meneguhkan aliansi militer dengan Amerika Serikat. Perubahan ini adalah respon Jepang dari adanya peningkatan militer Cina, yang dinilai pemerintah Jepang dapat mengancam integritas wilayahnya.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan respon Jepang dalam menghadapi peningkatan militer Cina dari tahun 2014 hingga 2022. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan mencantumkan data dari sumber dari situs resmi pemerintah Jepang dan portal berita, data kemudian dikumpulkan dengan studi dokumen lalu diolah dengan teknik kondensasi.

Peneliti menemukan bahwa, Jepang dan Amerika Serikat bersifat reaktif dan defensif di kawasan Asia Timur, dikarenakan Jepang tidak mampu ikut perang terbuka dengan adanya Artikel 9 dan Amerika Serikat tidak akan berperang secara ofensif dikarenakan bisa mengakibatkan Jepang ikut terjun ke perang tersebut. Ini yang mengakibatkan kedua negara menunggu datangnya serangan dari ancaman seperti Cina, yang bersengketa dengan Jepang di wilayah Senkaku/Diaoyu.

Kata kunci: Jepang, Cina, Artikel 9, aliansi, Amerika Serikat

ABSTRACT

JAPAN'S RESPONSE TO CHINA MILITARY BUILDUP ON 2014-2021

By

PIO DASMARA GEMINTANG

Japan and China have a long history, where Japan once fought and occupied China in the beginning of Japan's imperialism. Both countries eventually made peace with one another, however that peace has slowly deteriorated. China is building its military, and that buildup caused unrest due to China's action in displaying its power. China repeatedly violated other countries' borders, claimed islands to claiming the entire Southern Sea. Those actions have resulted in the peaceful oriented Japan to reinterpret their Article 9, the rule that set Japan's stance as pacifist. Japan also builds up its own military, and enforced their alliance with united states. This change is the response to China's military buildup, which Japan's government deemed as threatening to their territory integrity.

The purpose of this study is to describe the response from Japan to China military buildup from 2014 to 2022. The research used qualitative method and cited source from official site of Japanese Government and news outlet, the data was then collected with document study method and then processed with condensation technique.

Researcher found that Japan and United States behavior on East Asia is both reactive and defensive, this is caused by Japan unable to participate in open war due to Article 9 existence and United States won't do offensive war which could cause Japan to participate in that war as well. This caused the two countries to wait for attack from deemed threats like China, which is on a territorial dispute with Japan on Senkaku/Diaoyu.

Keywords: Japan, China, Article 9, Alliance, United States

**RESPON JEPANG TERHADAP PENINGKATAN MILITER CINA PADA
TAHUN 2014 - 2022**

Oleh

Pio Dasmara Gemintang

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **RESPON JEPANG TERHADAP
PENINGKATAN MILITER CINA PADA
TAHUN 2014 - 2022**

Nama Mahasiswa : **Pio Dasmara Gemintang**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616071030**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Gita Karisma, S.IP, M.Si.
NIP 198701282014042001


Indra Jaya Wiranata., S.IP., M.A.
NIP 199212192022031011

2. Ketua Hubungan Internasional


Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gita Karisma., S.IP., M.Si.

Sekretaris : Indra Jaya Wiranata., S.IP., M.A.

Anggota : Hasbi Sidik., S.IP., M.A.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida., M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Skripsi : 15 Juni 2023



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Pio Dasmara Gemintang
1616071030

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Batam pada tanggal 9 September 1998 dan merupakan anak pertama dari pasangan Betri Yarko dan Sri Indrawati. Pendidikan formal pertama yang penulis tempuh bertempat di TK Darussalam Batu Aji, kemudian dilanjutkan di SDIT Darussalam Batu Aji dan setelahnya SMPN 26 Batam.

Penulis merupakan lulusan dari SMAN 5 Batam dengan peminatan dalam Ilmu Pendidikan Sosial.

Atas saran konsultasi serta minat penulis pada ilmu sosial dan ketertarikan pada kejadian-kejadian internasional, penulis memutuskan untuk memilih dan menekuni jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, tempat penulis menempuh pendidikan sarjana.

Selama menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Hubungan Internasional, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan kepanitian seperti menjadi *volunteer* serta anggota publikasi dan dokumentasi di berbagai kegiatan. Contohnya adalah acara internasional seperti IICIS (International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies) dan IORA (Indian Ocean Rim Organization).

*“Never surrender your morals and integrity, even in the darkest time.
Because it’s the torch that will show you the way out.”*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT., karena atas berkat penyertaannya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul “*Respon Jepang Terhadap Pembangunan Militer Cina Tahun 2014-2022*” adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Ida Nurhaida., M.Si., selaku dekan FISIP Unila;
3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A., selaku ketua Jurusan Hubungan Internasional;
4. Mba Gita Karisma., S.IP., M.Si., selaku pembimbing utama atas kesabaran dan ketersediaan dalam membantu penulis melalui kritik, saran dan bimbingannya dalam menulis skripsi ini;
5. Bang Indra Jaya Wiranata., S.IP., M.A., selaku pembimbing kedua atas kesabaran, ketersediaan dan bantuan kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku penguji utama pada ujian skripsi, penulis atas kritik, masukan dan sarannya agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Betri Yarko dan Ibu Sri Indrawati tersayang, selaku orang tua penulis yang telah menuntun, mengasuh, menyekolahkan dan membiayai penulis, terima kasih atas segalanya;

8. Kepada Adik Arindhia Dasmara Gemintang, selaku adik kandung penulis yang mengingatkan bahwa penulis harus menyelesaikan skripsi dan lulus perkuliahan.
9. Tante Siti Marwati dan Om Egy Margiono, atas dukungan dan dorongan kepada penulis dalam kehidupan dan perkuliahan, terimakasih atas segala bimbingan, nasehat, bantuan dan wejangannya kepada penulis
10. Adik-Adik sepupu, Tegar Anima, Raisya Atma Lovy dan Eywa Lukita, telah terus menyemangati dan menghibur penulis dalam upayanya menulis skripsi dan menyelesaikan perkuliahan.
11. Kumpulan Beruang Besar (3 Bear), Antonius “Ton” Pratama, dan Titik “Tifu” Kurniasari, atas pertemanan, waktu, upaya dan berbagai pengorbanan yang telah diberikan. Keduanya telah sangat membantu penulis, baik dalam segi perkuliahan maupun kehidupan dari hari pertama mengenal mereka. *You guys are the best, and I will be forever grateful to you two.*
12. Teman-teman seperjuangan selama di jurusan HI, Risa, Rona, Ananda, Male, Bagus dan HI Angkatan 16 lainnya. Geraldo, Fitrah, Aay, Wayan, sebagai para senior, semoga kalian sukses dan diberkati dalam segala aktifitas kalian.
13. Teman-teman penulis serta kerabat di Batam, Ika, Dimas, Ihwan, Dea, Novi, yang tidak kunjung berhenti mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi dan skripsinya agar bisa kembali pulang ke Batam.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023
Penulis,

Pio Dasmara Gemintang

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori dan Konseptual.....	19
2.2.1 <i>Balance of Power</i> Theory	20
2.2.1 Konsep Aliansi.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Fokus Penelitian.....	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4 Teknik dan Pengumpulan Data	24
3.5 Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Respon Jepang Akan Kenaikan Militer Cina Dari Dalam Negri	25
4.1.1 Artikel 9 Sebagai Pondasi Dari Pendirian Pasifisme Dan Pertahanan Jepang..	25
.....	25
4.1.2 Pembaharuan Aset-Aset Militer Jepang.....	29
4.1.3 Kenaikan Anggaran Militer Jepang Secara Berkala	32

4.1.4	Tindakan <i>Japan Self Defense Force</i> dalam Merespon Aktifitas Militer Cina di Perbatasan	33
4.2	Respon Jepang Terhadap Peningkatan Militer Cina Secara Bilateral	36
4.2.1	Peneguhan Aliansi Militer dengan Amerika Serikat.....	36
4.3	Analisis Mengenai Peningkatan Aliansi Militer Jepang dan Amerika Serikat	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		50
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Saran Peneliti	51
DAFTAR PUSTAKA.....		52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Peneliti.....	22
Gambar 4.1 Hasil dari survei mengenai perubahan Artikel 9	28
Gambar 4.2 Kapal Helicopter Carrier Jepang JS Izumo yang sedang dimodifikasi	30
Gambar 4.3 Pesawat Tempur X-2 Shinshin	32
Gambar 4.4 Kapal Induk Liaoning milik Cina saat melalui Okinawa	34
Gambar 4.5 Foto kapal Jepang dan Cina saling memantau dari jarak dekat.....	35
Gambar 4.6 Jalur pesawat Cina yang dicegat oleh Jepang kurun waktu 1 Juli – 30 September 2021.....	35
Gambar 4.7 Rangkuman dari latihan militer yang dilakukan Jepang dan sekutunya	39
Gambar 4.8 Pesawat Tempur Generasi Kelima F-35A yang dimiliki Jepang.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan penelitian terdahulu	17
--	----

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of South East Asian Nations
BDF	: Basic Defense Force
DDF	: Dynamic Defense Force
GDP	: Gross Domestic Product
JSDF	: Japan Self Defense Force
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NDPG	: National Defense Program Guideline
USD	: United States Dollar
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang sebelum dan pada masa perang dunia kedua merupakan kekuatan yang dominan di kawasan Asia Timur, militernya kuat dan memiliki banyak wilayah jajahan. Pasukan militernya mampu bertempur menghadapi Amerika Serikat di kawasan Pasifik, sebagai bukti seberapa besar dan tangguh militer Jepang saat itu. Akan tetapi, perlahan-lahan Jepang mengalami kekalahan hingga pada akhirnya menyerah kepada Amerika Serikat setelah mengalami kekalahan telak dan menerima serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Setelah perang dunia kedua, Jepang memprioritaskan pembangunan kembali negaranya yang hancur oleh perang. Jepang selepas dijajah oleh pasukan sekutu di tahun 1952, mulai membangkitkan kekuatan perekonomian mereka (Hane, 2018). Ditambah lagi, Jepang tidak melepaskan hubungannya dengan Amerika Serikat, kedua negara menjalin persekutuan hingga taraf dimana Amerika Serikat diperbolehkan memiliki pangkalan militer di wilayah Jepang. Untuk memperjelas posisi negaranya di kancah dunia internasional, Jepang membentuk Artikel 9 yang dibawah bimbingan para sekutu (The Constitution of Japan, n.d.).

Artikel 9 merupakan sebuah peraturan yang menetapkan bahwa Jepang adalah negara yang pasifis, tidak mempertahankan militer tradisional dan tidak menggunakan peperangan sebagai upaya mereka dalam mencapai kepentingan nasionalnya (The Constitution of Japan, n.d.). Peraturan ini menjadikan Jepang sebagai negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata yang formal seperti negara-negara lain, Jepang akan tetapi, tetap memiliki angkatan bersenjata yang

berdedikasi untuk melindungi wilayahnya, Pasukan tersebut bernama *Jietai* atau biasa disebut sebagai *Japan Self Defense Force* (JSDF). Pasukan ini hanya beroperasi di wilayah Jepang, dan berdedikasi penuh dalam upaya pertahanan negara (Ministry of Defense, n.d.).

Di awal masa perang dingin, Jepang mulai menormalkan hubungan bilateralnya bersama negara-negara lain, salah satunya adalah bekas jajahannya yaitu Cina. Kedua negara berfokus untuk membangun kembali negaranya dan bahkan mulai berdagang antara satu dan lainnya, akan tetapi hubungan diplomatis diantara kedua negara baru mulai diperbincangkan kembali di tahun 1971 dan disetujui di tahun 1973. Dengan berlangsungnya hubungan diplomatis di kedua negara, maka hubungan bilateral antara Jepang dan Cina kembali normal (Chronology 1973, 1974).

Jepang tidak bisa secara bebas menentukan kerjasama bilateral dalam bentuk traktat dengan negara komunis dikarenakan hubungannya yang dekat dengan Amerika Serikat, kedua negara telah menandatangani *Mutual Defense Agreement* dimana Amerika Serikat menganggap Jepang sebagai sekutu dan akan mempertahankan Jepang jika negara tersebut diserang oleh negara lain (Kapur, 2018). Dengan Cina memiliki hubungan dengan Uni Soviet, ini menempatkan posisi Jepang dan Cina dalam dua spektrum politik yang berbeda dan Jepang tidak bisa membentuk traktat dengan Cina tanpa mendapatkan dampak politik dalam hubungannya dengan Amerika Serikat.

Meskipun ada ketegangan, Jepang dan Cina berupaya untuk menunjukan kepada dunia internasional bahwa hubungan bilateral kedua negara bisa digolongkan harmonis. Jepang dan Cina saling berdagang dan Jepang bahkan memberikan bantuan dalam bentuk investasi (Japan, 2018). Jepang dan Amerika Serikat adalah negara yang tetap memiliki hubungan dengan Cina disaat insiden *Tianmen Square* di tahun 1986, sebuah insiden pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan Cina menerima kecaman dan sanksi dari seluruh dunia (JapanForward, 2022). Hal ini membuktikan seberapa erat hubungan diantara ketiga negara pada masa tersebut.

Akan tetapi, hubungan bilateral diantara Jepang dan Cina mulai renggang saat memasuki tahun 1990an. Perenggangan ini dimulai dengan adanya dorongan

keras gerakan Anti Jepang dikalangan masyarakat Cina, salah satu tokoh Cina yang bernama Jiang Zemin memberikan pidato bahwa “Cina dan Jepang harus bisa belajar dari sejarah mereka yang tragis selamanya” (JapanForward, 2022). Jiang Zemin juga berkata bahwa “Cina harus tetap menyebutkan isu sejarah ke Jepang selamanya”, dilanjutkan dengan “Jepang harus belajar dari sejarahnya dan bersungguh-sungguh menyesali tindakan agresinya agar mendapatkan kepercayaan dari rakyat Asia dan dunia” (JapanForward, 2022).

Meski terdapat usaha Jepang untuk meminta maaf akan kejadian di masa lalu, Cina tetap tidak menerima maaf dari Jepang yang dinilai tidak sungguh-sungguh. Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe berpidato pada tanggal 14 Agustus 2015, dalam peringatan 70 tahun setelah akhir perang dunia ke dua. Shinzo Abe menyebutkan bahwa Jepang menyesali tindakannya di masa lalu, akan tetapi Shinzo Abe juga menyebutkan bahwa “Generasi masa depan Jepang tidak ditakdirkan meminta maaf, dikarenakan mereka tidak ada kaitannya dengan perang di masa lalu”. Terdapat opini bahwa minta maaf Jepang tidak kunjung diterima Cina, dikarenakan Cina memiliki standar yang sangat tinggi untuk maaf tersebut (Suzuki, 2015).

Relasi antara Cina dan Jepang lebih memburuk dengan Cina memiliki dan mengembangkan persenjataan nuklir, uji coba persenjataan nuklir oleh Cina menyebabkan Jepang menarik bantuan finansialnya ke Cina (Los Angeles Times, 1995). Jepang memiliki sejarah dimana dua kota di wilayahnya, Hiroshima dan Nagasaki, menerima serangan bom atom. Aspek sejarah ini menyebabkan Jepang bereaksi keras akan uji coba bom nuklir oleh Cina (The New York Times, 1964).

Gesekan-gesekan militer antara Jepang dan Cina terjadi di perbatasan maritim diantara kedua negara, gesekan ini kemudian diperparah saat Jepang membeli tiga pulau di Kepulauan Senkaku dari pemilik privat. Hal ini menimbulkan amarah dari rakyat Cina yang melihat tindakan ini sebagai Jepang mengambil wilayahnya (The Guardian, 2012). Sedangkan Jepang berargumen bahwa Kepulauan Senkaku adalah milik Jepang secara historis (Japan, 2010).

Cina juga secara berkala mengembangkan kapabilitas militernya dengan memperbaharui persenjataan, mengembangkan teknologi militer, memperbesar angkatan bersenjataanya disegala matra, dan rajin mengadakan latihan militer.

Perkembangan militer Cina yang terus terjadi menyebabkan militernya dinilai berada di posisi lima teratas dari seluruh dunia (Global Firepower, n.d.). Cina juga meluncurkan kapal induknya yang bernama Liaoning di tahun 2012, sebuah bukti akan komitmen Cina untuk mengembangkan kekuatan maritim negaranya. Sebuah kapal induk dinilai sebagai simbol dari kekuatan angkatan laut suatu negara, menurut Jenderal Xu Guangyu (BBC, 2011).

Maksud dari kapabilitas disini adalah seberapa mampu suatu hal dalam menjalankan tugas sebagaimana fungsinya. Dalam konteks ini, kapabilitas militer adalah seberapa mampu militer tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai angkatan bersenjata yang dimiliki suatu negara. Bagaimana pasukan mampu bertempur, menggunakan peralatan militer sebagaimana mestinya dan kekuatan awal yang menggolongkan kesiapan tempur. Kemampuan tersebut kemudian digabungkan menjadi kapabilitas militer.

Kekuatan Cina yang terus berkembang, sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu, dan kapal milik Cina memasuki wilayah laut Jepang menyebabkan gesekan-gesekan di sektor keamanan. Jepang merespon segala bentuk gangguan akan kedaulatannya, seperti mengirimkan protes saat wilayahnya dimasuki secara ilegal dan berargumen mengenai sengketa yang terlibat. Akan tetapi, dorongan untuk Jepang mulai kembali memikirkan opsi militer dimulai dari Perdana Menteri Shinzo Abe yang berencana merivis Artikel 9, peraturan yang menyatakan pasifisme Jepang (Linda Sieg, 2013).

Perubahan tersebut mengharuskan parlemen Jepang untuk mengadakan perundingan nasional. Ini dikarenakan perubahan tersebut merupakan perubahan tingkat tinggi yang mengubah dasar negara Jepang selepas perang dunia kedua, tindakan untuk merevisi peraturan ini dinilai sulit terutama dengan berbedanya pendapat dikalangan rakyat Jepang mengenai peraturan tersebut (CFR, n.d.). Meski begitu, di tahun 2014 terdapat 'interpretasi kembali' dari Artikel 9 yang menyebabkan JSDF bisa beroperasi diluar wilayah Jepang dalam misi khusus dan membantu sekutu Jepang jika diserang (Independent Record, 2014).

Cina merespon tindakan ini secara negatif, Jepang dinilai telah melanggar dedikasinya sebagai negara pasifis. Namun tindakan ini didukung oleh negara-negara yang memiliki relasi baik dengan Jepang, terutama Amerika Serikat dimana

negaranya bisa dinilai sebagai mitra yang sebanding setelah adanya reinterpretasi. Jepang berusaha untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat, usaha ini bisa dilihat dari adanya upaya kerjasama di berbagai bidang, hal ini memastikan bahwa Jepang tetap berkomitmen dengan aliansinya bersama Amerika Serikat (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015).

Jepang juga mulai memikirkan opsi militer dalam menangani isu keamanan, terutama dalam merespon perkembangan militer Cina. Opsi ini bisa dilihat dari berbagai bentuk peningkatan seperti menaikkan anggaran militer, modernisasi persenjataan, peningkatan jumlah pasukan bersenjata serta menggelar latihan militer secara berkala. Meski dengan tetap adanya Artikel 9, Jepang tidak menunjukkan tanda bahwa negaranya akan mengurangi peningkatan kekuatan militernya. Bahkan, di tahun 2022, Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa Jepang berencana untuk membangun militernya lebih lanjut. Pembangunan ini dinilai yang paling signifikan bagi Jepang semenjak perang dunia dua (Sipri, 2023).

Dengan adanya reinterpretasi Artikel 9, Jepang kemudian memiliki kemampuan untuk membela sekutunya jika terdapat serangan pada wilayahnya. Seperti pasukan Amerika Serikat yang berada di wilayahnya. Akan tetapi, Jepang tidak membutuhkan reinterpretasi mengenai hal tersebut, karena serangan pada Amerika Serikat di tanah Jepang sudah termasuk dalam serangan terhadap Jepang itu sendiri. Alhasil Jepang akan meneguhkan Artikel 9 tanpa adanya reinterpretasi, dikarenakan wilayahnya sudah dilanggar dan Jepang memiliki hak untuk mempertahankan diri.

1.2 Rumusan Masalah

Jepang yang cenderung bersifat pasifis dalam menghadapi berbagai isu keamanan internasional mulai memikirkan opsi militer setelah adanya interpretasi kembali Artikel 9 di 2014, kembalinya opsi militer dalam pengambilan keputusan Jepang dikarenakan dengan adanya persepsi ancaman pemerintah Jepang terhadap Cina dimana kedua negara terlibat dalam sengketa wilayah. Dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan berikut: **Bagaimana**

Jepang merespon pembangunan kekuatan militer Cina pada tahun 2014-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa tindakan Jepang dalam upayanya merespon naiknya kekuatan militer Cina. Respon dari isu tersebut dilihat dari berbagai aspek seperti:

- Peningkatan jumlah pasukan serta modernisasi aset-aset militer Jepang.
- Interpretasi kembali peraturan mengenai pasifisme Jepang
- Kenaikan anggaran belanja militer Jepang
- Aktifitas pencegahan pasukan pembela diri Jepang di perbatasan
- Peneguhan traktat militer antara Jepang dan Amerika Serikat.
- Jual beli aset militer antara Jepang dan Amerika Serikat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Keilmuan:

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih terhadap isu keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur.
- b. Dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai bagaimana Jepang mencoba untuk menyelesaikan isu keamanan negaranya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Isu keamanan di Asia Timur yang terjadi antara Jepang dan Cina sudah terjadi sejak lama, dan merupakan isu yang cukup penting untuk diteliti oleh beberapa akademisi yang berusaha untuk memahami keseluruhan situasi keamanan yang tidak kunjung mereda. Negara-negara di Asia Timur terus meningkatkan kekuatan militer mereka sebagai respon terhadap satu sama lainnya, sehingga situasi keamanan di wilayah tersebut cenderung mengarah ke titik dimana negara-negara berkompetisi dalam mencapai keunggulan militer atau menyaingi tetangganya. Adapun penelitian mengenai isu ini yang dicakup oleh penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Christoper W. Hughes, Andrew R. Capistrano berserta Shuhei Kurizaki, Zeynab Farhadi, Bjorn Elias Mikalsen Gronning dan Ryo Sahashi.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Christoper W. Hughes, seorang professor yang berfokus pada politik internasional dan pembelajaran mengenai Jepang di University of Warwick. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016 ini memiliki judul "*Japan's 'Resentful Realism' and Balancing Cina's Rise*" yang berfokus pada bagaimana Jepang merubah cara bagaimana mereka menghadapi Cina dengan mulai mempertimbangkan opsi militer. Hal ini ditandai dengan Jepang secara aktif membangun kekuatan militernya, memperkuat relasi antara Jepang dengan Amerika Serikat dan memberikan tekanan kepada Cina melalui jalur diplomasi.

Christoper berargumen bahwa menurut *Neorealist*, Jepang sebenarnya gagal dalam merespon naiknya kekuatan Cina dikarenakan Jepang tidak berupaya untuk membangun kekuatan yang seimbang dengan militer Cina itu sendiri. Ada beberapa argumen mengapa hal demikian terjadi, contoh paling jelas adalah

argumen dimana terdapat berbagai macam pihak di tingkat domestik yang lebih menekankan ke jalur damai, ataupun kepercayaan bahwa aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat masih sangat kuat dan seharusnya akan memaksa Cina untuk berpikir lagi sebelum melakukan aksi-aksi yang dapat memicu respon militer keras.

Argumen ini dikarenakan tindakan Jepang yang membangun kekuatan militernya sesuai dengan konsep *Defensive Realism* dimana fokus pembangunan militer Jepang terletak pada pertahanan negara dengan akuisisi persenjataan 'defensif' dan cenderung mengandalkan aliansinya dengan Amerika Serikat sebagai negara superpower global (Hughes, 2015).

Akan tetapi, Christopher menyebutkan bahwa setidaknya perubahan mulai terjadi di Jepang melihat perkembangan militer Cina. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya amandemen undang-undang yang secara umumnya bisa me'normal'kan militer Jepang kembali atau remilitarisasi. Ini berarti Pasukan Pertahanan Diri Jepang atau *Japan's Self Defense Force* (JSDF) akan diberikan kebebasan lebih dalam berbagai hal mulai dari perubahan doktrin tempur, pengembangan persenjataan dan bahkan kemampuan untuk beroperasi diluar wilayah Jepang tanpa harus terlibat dalam misi khusus. Christopher menulis jurnal tersebut dengan tujuan melihat apakah tindakan penyeimbangan Jepang sudah mulai memasuki fase 'keras' dimana Jepang mulai mempertimbangkan opsi militer dibandingkan 'lembut' yang berfokus pada diplomasi (Hughes, 2015).

Jepang sepertinya terbelah dengan adanya perbedaan pendapat mengenai bagaimana sikap yang harus digunakan dalam menghadapi Cina, satu pihak ingin menggunakan kapabilitas militer dan meningkatkan kemampuan Jepang dalam merespon isu-isu keamanan. Sedangkan pihak lainnya lebih memilih agar Jepang menggunakan jalur diplomasi untuk menekan perkembangan Cina dan lebih mengandalkan aliansi yang ada. Hal ini cocok dengan asumsi *Defensive Realism* yang dijelaskan oleh *Neo-classical Realism*, bahwa suatu negara bisa tidak atau kurang dalam upaya mereka untuk menyeimbangkan kekuatan dengan suatu ancaman dikarenakan adanya suatu kondisi domestik yang tidak memungkinkan, meski secara strategis peningkatan tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan (Hughes, 2015).

Menurut Christopher, salah satu alasan utama mengapa respon Jepang dinilai kurang dikarenakan Jepang pada awalnya tidak menganggap perkembangan Cina sedemikian pesat terutama dalam ranah militer. Di era perang dingin, Cina bukanlah sebuah kekhawatiran menurut Jepang yang lebih berfokus pada ancaman Uni Soviet yang lebih serius dan mampu untuk menggunakan persenjataan nuklir. Ini mengapa Jepang dan negara Asia Timur lainnya dikejutkan dengan perkembangan Cina yang cepat terjadi. Akan tetapi, para pembuat kebijakan di Jepang masih yakin Cina bisa diajak untuk berkompromi, bahkan menjadi negara yang masih berhubungan dengan Cina setelah insiden Tiananmen Square di tahun 1989 meski adanya isolasi internasional terhadap negara tersebut (Hughes, 2015).

Dengan melihat sejarah serta perkembangan kedua negara, Christopher menyimpulkan bahwa Jepang sudah memulai untuk mengambil tindakan untuk mulai menyeimbangkan kekuatannya kembali setelah melihat kapabilitas Cina. Terdapat desakan dari dalam untuk mempertimbangkan status quo antara Jepang dan Cina, banyak pihak Jepang yang percaya bahwa *offense-defense balance* diantara kedua negara sudah tidak lagi bertumpu pada Jepang yang lebih unggul, terutama dengan modernisasi militer Cina dan Amerika Serikat yang sudah tidak terlalu aktif dalam aktivitasnya sebagai 'polisi dunia'. Jepang menyeimbangi Cina dengan dua cara, melalui jalur lembut dengan cara berdiplomasi dengan negara Asia Timur lainnya yang terancam dengan Cina, dan melalui jalur keras dengan memperbaharui dan meningkatkan kapabilitas Pasukan Pembela Diri Jepang untuk menghadapi berbagai macam isu keamanan.

Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Andrew R. Capistrano dan Shuhei Kurizaki, berjudul "*Japan's Changing Defense Posture and Security Relations in East Asia*". Penelitian keduanya lebih berfokus kepada usaha perubahan kebijakan di Jepang akan interpretasi kembali Artikel 9 di tahun 2015 mengenai penggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Banyak yang melihat bahwa perubahan ini masih seiring dengan posisi Jepang dalam menghadapi ancaman bersama dan diperlukan untuk Jepang dalam menghadapi perubahan dinamis dalam kekuatan yang ada di wilayah Asia Timur. Akan tetapi, Andrew dan Shuhei menilai bahwa tindakan ini yang seiringan dengan terjadinya sengketa Kepulauan Senkaku dapat memperparah dilemma keamanan antara Jepang dan

Cina, melemahkan komitmen Amerika Serikat untuk tetap membantu pertahanan Jepang dan sebagai bukti terjadinya perubahan dari doktrin pertahanan yang telah berlangsung semenjak akhir Perang Dunia Kedua (Capistrano, 2016).

Perubahan ini menuai perdebatan domestik yang cukup sengit, ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara pihak yang ingin Jepang untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai pasifis dan yang ingin Jepang untuk memperkuat kapabilitas militernya agar dapat lebih mampu untuk menghadapi berbagai isu keamanan. Andrew dan Shuhei percaya bahwa tindakan ini dapat berdampak negatif, ini dikarenakan dengan naiknya kapabilitas militer Jepang maka negara tetangga sekitar Jepang juga akan merasa khawatir. Dalam usahanya untuk mencapai keamanan, Jepang bisa saja menyebabkan rasa ketidakamanan dan ketidakpastian ke negara-negara tetangga.

Penelitian Andrew dan Shuhei melihat bagaimana perubahan Artikel 9 dapat mempengaruhi keseluruhan kapabilitas pertahanan Jepang. Artikel 9 merupakan peraturan yang mencegah Pasukan Pembela Diri untuk membantu Amerika Serikat dalam operasi militer kecuali Jepang diserang secara langsung. Revisi yang terjadi menghilangkan batasan ini dengan memperbolehkan Pasukan Pembela Diri untuk melakukan aksi militer ketika Jepang tidak dalam kondisi diserang dan kemampuan untuk memberikan bantuan operasional militer diluar wilayah kedaulatan Jepang. Artikel ini yang membatasi militer Jepang sebagai 'Pasukan Pembela Diri' yang hanya bisa beroperasi di wilayah domestik. Dengan hilangnya batasan ini, militer Jepang kembali memiliki kapabilitas militer secara penuh (Capistrano, 2016).

Jepang secara beberapa dekade beroperasi dengan *Yoshida Doctrine* yang berfokus pada pembangunan kekuatan ekonominya pasca perang, hal ini juga memungkinkan Jepang untuk meyakinkan negara-negara tetangganya bahwa Jepang tidak memiliki agenda untuk membangun kembali militernya dan lebih berfokus kepada ekonomi domestik. Jepang akan mengandalkan Amerika Serikat dalam pertahanan nasional, hal ini kemudian berubah dalam traktat aliansi Jepang dan Amerika Serikat dimana Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk membantu Jepang dalam skenario dimana Jepang menerima serangan. Akan tetapi, Jepang tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal yang sama untuk Amerika

Serikat. Jepang juga akan lebih berfokus kepada institusi internasional dalam upayanya menyebarkan pengaruhnya dibandingkan dengan kekuatan langsung. Perubahan pada Artikel 9 akan secara langsung bertentangan dengan doktrin ini (Capistrano, 2016).

Andrew dan Shuhei berpendapat bahwa perubahan peraturan ini dapat memicu perubahan-perubahan lainnya. Meski perubahan yang terjadi masih searah dengan arahan Jepang selepas perang dunia kedua sebagai negara yang cinta damai, potensi untuk kebijakan tersebut berubah semakin memungkinkan terutama jika terjadi situasi dimana Jepang harus merevisi pendirian dalam menghadapi isu yang mengancam kedaulatan nasional (Capistrano, 2016). Bahkan jika kapabilitas militer Jepang kembali dapat beroperasi sepenuhnya seperti militer negara lain, ada kekhawatiran hal tersebut akan memicu Cina dan meningkatkan ketegangan di Asia Timur lebih lanjut, situasi yang *Yoshida Doctrine* ingin hindari.

Argumen yang digunakan Perdana Menteri Shinzo Abe mengenai revisi Artikel 9 adalah terciptanya *deterrence* atau penangkal di Asia Timur. Dengan hilangnya batasan Jepang untuk membantu sekutunya, Jepang bisa saja membantu Amerika Serikat atau negara sekutu yang sepihak dalam berbagai operasi militer. Banyak yang menilai bahwa ini dapat mempererat hubungan pertahanan yang ada antara Jepang dan Amerika Serikat, tapi hal ini tidak membantu banyak dalam hubungan penangkal dikarenakan Amerika Serikat tetap memiliki kewajiban untuk membantu Jepang dalam mempertahankan wilayahnya jika terjadi serangan. Argumen tersebut sepertinya hanya menjadikan hubungan ini saling menguntungkan dibandingkan dengan bantuan sepihak di perjanjian sebelumnya (Capistrano, 2016). Banyak argumen mengapa revisi ini tidak relevan dalam menciptakan penangkal, salah satunya seperti Shuhei Kurizaki berpendapat bahwa untuk menciptakan penangkal maka Artikel 9 harus dihapuskan secara keseluruhan.

Revisi ini juga sangat berguna bagi Jepang dalam sengketa Kepulauan Senkaku dengan Cina yang dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan pada isu yang ada. Klaim kedua negara tersebut diwarnai dengan berbagai insiden di wilayah sengketa hingga kedua negara rela untuk menerjunkan angkatan laut mereka ke wilayah sengketa untuk memperkuat klaim mereka pada kepulauan tersebut. Dengan Artikel 9 direvisi, Angkatan Laut Jepang memiliki

kebebasan lebih untuk terlibat dalam pertempuran jika aksi saling tahan di Kepulauan Senkaku pecah.

Kedua peneliti menyimpulkan tiga klaim dari penelitian mereka; Pertama, interpretasi yang ambigu mengenai Artikel 9 meruntuhkan kepastian yang telah diberikan Jepang selama beberapa dekade sebagai negara yang berfokus pada pembangunan perekonomiannya. Kedua, belum ada komitmen baru yang muncul dengan adanya revisi perarturan tersebut dan yang terakhir, adanya kemungkinan peningkatan keeratan persekutuan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam operasi keamanan wilayah. Peneliti juga menyimpulkan bahwa revisi ini dapat menimbulkan rasa ketidakamanan di Jepang, dengan semakin aktifnya Jepang mencoba untuk menyaingi ancaman yang ada maka tindakan yang diambil juga menimbulkan rasa tidak aman dengan negara-negara tetangga sehingga potensi untuk menciptakan ketegangan di Asia Timur semakin tinggi.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Zeynab Farhadi, Bahareh Sazmand, Masoud Mousavi Shafae dan Mohsen Eslami yang berjudul “*Regional Variables Influencing Japan’s Security Developments: 2012-2019*”, Jurnal ini berfokus ke perubahan posisi Jepang mengenai isu keamanan yang disebabkan oleh situasi kawasan dan kebijakan luar negeri yang berubah dari pasif menjadi normal (Zeynab Farhadi, 2021).

Jurnal ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan mengenai perubahan tersebut yang disebabkan ancaman lokal yang ada di kawasan Asia Timur dan kenapa variabel lokal ini dianggap mengancam. Jurnal ini menggunakan teori *Balance of Threat* oleh Stephen Walt yang dinilai memiliki dua keuntungan. Keuntungan dalam menggunakan teori tersebut dalam isu ancaman *regional* adalah kemampuan untuk memakai sudut pandang secara semantik dan secara material yang memungkinkan analisis dilakukan secara komprehensif, dan kemampuan untuk menggaris besarkan perubahan respon Jepang terhadap perubahan keamanan dalam bentuk penyeimbangan secara *internal* dan *external* (Zeynab Farhadi, 2021).

Kapabilitas keseluruhan, letak geografis, kemampuan ofensif dan tujuan agresif. Berdasarkan empat komponen yang mendefinisikan ancaman dari Teori *Balance of Threat* tersebut, Jepang menyimpulkan bahwa Cina dan Korea Utara adalah ancaman nasional bagi negaranya. Meskipun terdapat perbedaan kekuatan

yang jelas diantara Cina dan Korea Utara, keduanya tetap dinilai sebagai ancaman dikarenakan kemampuan untuk merealisasikan ancaman mereka dan tujuan yang dinilai bisa mengancam keamanan di kawasan tersebut (Zeynab Farhadi, 2021). Cina memiliki kapabilitas militer yang cukup untuk mengancam kedaulatan Jepang secara langsung sedangkan Korea Utara mengancam kestabilan keamanan Asia Timur dengan rudal balistiknya yang memiliki kapabilitas nuklir.

Keadaan ini telah mendorong Jepang untuk menyeimbangkan permasalahan ini secara internal dengan institusi dan undang-undang, serta secara external dengan memperdalam aliansi dengan Amerika Serikat dan membangun koneksi ke luar. Pembuat kebijakan Jepang menilai meski terdapat keterbatasan dalam kebijakan luar negeri dan keamanannya, negara mereka telah berubah dengan berbedanya perhitungan strategis dan kebijakan luar negeri dari yang dulu (Zeynab Farhadi, 2021).

Jurnal ini menyimpulkan bahwa terdapat isu keamanan yang cukup rumit dan persepsi Jepang akan Cina dan Korea Utara menjadi pendorong dalam perubahan kebijakannya, hal ini sesuai dengan konteks yang disebut didalam teori *Balance of Threat* oleh Stephen Waltz sebagai respon dengan adanya permasalahan keamanan. Hal ini menyebabkan Jepang untuk lebih memperkuat keamanan nasionalnya, mempertegang keadaan di perbatasan dan kemungkinan memicu perlombaan senjata di Asia Timur dikarenakan upaya untuk terus menyeimbangi ancaman tersebut (Zeynab Farhadi, 2021).

Jurnal keempat ditulis oleh Bjorn Elias Mikalsen Gronning yang berjudul "*Japan's Shifting Military Priorities: Counterbalancing Cina's Rise*". Jurnal ini melihat bagaimana prioritas militer Jepang berubah dengan meningkatnya kapabilitas Cina, perubahan tersebut dilihat dari Perspektif Realis dengan teori *Balance of Threat* (Grønning, 2014). Jurnal ini berfokus pada dua hal, penjelasan mengenai perubahan prioritas militer Jepang dan mengapa *Balance of Threat* dinilai lebih sesuai dalam menjelaskan perubahan tersebut dibanding *Balance of Power*.

Perubahan prioritas ini dimulai semenjak tahun 2010, dimana adanya revisi *National Defense Program Guidelines (NDPG)* atau Panduan Program Pertahanan Nasional yang direvisi setiap sepuluh tahun. Perubahan ini terletak pada pergantian doktrin konsep dari *Basic Defense Force (BDF)* menjadi *Dynamic Defense Force*

(DDF). Perubahan tersebut bertujuan untuk menjadi respon akan ekspansi oportunis Cina di Laut Selatan yang disebut oleh NDPG sebagai Sengketa Zona Abu-Abu atau *Grey Zone Dispute* (Grønning, 2014).

Konsep DDF berfungsi sebagai basis bagaimana JSDF merespon berbagai ancaman di daerah perbatasan, dengan menunjukkan kekuatan serta kapabilitas militer JSDF sebagai bentuk *deterrence* terhadap aksi-aksi yang dapat memprovokasi Jepang untuk menjaga kedaulatan negara. *Deterrence* yang dimaksud harus bersifat dinamis, hal ini mengharuskan JSDF untuk lebih aktif dan siap beroperasi untuk merespon ancaman. Keaktifan tersebut diiringi dengan kenaikan anggaran pertahanan militer Jepang, pertama kalinya terjadi sejak sebelas tahun yang lalu (Grønning, 2014).

Jurnal ini membahas persenjataan secara rinci, berbagai persenjataan dari berbagai cabang ikut dibahas dengan penekanan terhadap pembaharuan atau pergantian persenjataan dengan yang lebih canggih. Cina terus meningkatkan kemampuan militernya dan Jepang dinilai tidak boleh kalah dalam menyainginya, apalagi dengan banyaknya peralatan militer Jepang dinilai sudah tidak jaman di periode tersebut (Grønning, 2014).

Tidak hanya itu, Jepang juga berupaya untuk memperkuat aliansi dengan negara-negara yang berkerjasama dengan mereka, terutama Amerika Serikat. Jepang dan Amerika Serikat sama-sama setuju mengenai keputusan yang diambil dalam menghadapi Cina, kedua negara sepakat untuk mengarahkan Cina agar mereka bertindak lebih bijak dan tidak meningkatkan ketegangan regional agar terjadi kestabilan (Grønning, 2014).

Balance of Threat dinilai dapat menjelaskan tindakan Jepang dalam aksi menyeimbangkan kekuatan dengan Cina, terutama dengan bagaimana Jepang sangat sensitif dengan tindakan Cina yang dapat dilihat sebagai proyeksi kekuatan dan ambisinya. Kapal Angkatan Laut Cina sering mendekati perbatasan Jepang dan sengketa Pulau Senkaku/Diaoyu membuktikan bahwa Cina tidak segan dalam menghadapi Jepang, bahkan dengan dukungan Amerika Serikat. Cina bahkan dinilai lebih mengancam secara militer dibandingkan Korea Utara (Grønning, 2014).

Perubahan iklim keamanan di Kawasan Asia Timur menyebabkan Jepang untuk meninggalkan dan mengubah berbagai prinsip keamanan mereka, meski banyak perdebatan mengenai hasil dari perubahan tersebut, jurnal ini menjelaskan bahwa pemerintah Jepang menanggapi Cina sebagai ancaman serius yang berhak ditanggapi dengan merubah pendirian serta posisi Jepang secara militer (Grønning, 2014).

Jurnal kelima ditulis oleh Ryo Sahashi yang berjudul “*Japan’s Strategy Amid US-Cina Confrontation*”, jurnal ini lebih berfokus pada hubungan antar negara dan strategi yang digunakan Jepang dalam menghadapi iklim politik di kawasannya. Ditengah-tengah Amerika Serikat dan Cina yang berkompetisi penuh disegala sisi, Jepang berupaya untuk mempertahankan diplomasi dengan Cina dan berupaya mengamankan aliansi dengan Amerika Serikat (Sahashi, 2020)

Fokus Jepang dalam menghadapi Cina dan Amerika Serikat terletak dalam upayanya untuk menstabilkan kawasan Asia Timur, hal ini hendak dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara Cina dan Jepang. Meski Amerika Serikat mengambil jalur yang konfrontasional, Jepang tetap berupaya untuk membangun hubungan bilateral dengan Cina meski merubah berbagai peraturan mengenai angkatan bersenjata serta meningkatkan kapabilitas militernya. Hal ini dinilai sebagai langkah pragmatis dalam menghadapi situasi yang berlangsung (Sahashi, 2020).

Jepang memiliki sejarah panjang mengenai perubahan nilai dan norma, dimulai dari *Meiji Restoration* yang secara perlahan mengubah Jepang dari peradaban feodal kembali menjadi peradaban imperial dengan pemerintahan yang tersentralisasi serta membuka jalan untuk modernisasi Jepang. Jepang ingin dilihat sebagai negara yang progresif dan berperan aktif di dunia internasional, hal ini berkorelasi dengan tujuan Jepang untuk menstabilkan kawasan Asia Timur dengan cara membentuk peraturan, bantuan dalam berbagai bentuk serta pasukan pembela dirinya. Semua ini digunakan Jepang untuk menghadapi Cina dalam panggung bilateral, menggunakan pandangan strategis tersebut dalam hubungan diplomatis antar dua negara (Sahashi, 2020).

Hubungan Jepang dan Cina tidak selalu berfokus pada kancas keamanan, hal ini berbeda dibandingkan beberapa dekade yang lalu saat Jepang baru kembali

mendapatkan kedaulatannya di tahun 1952. Jepang saat pasca perang ingin melanjutkan hubungan dagang dengan Cina daratan utama, akan tetapi hal ini tidak berlangsung dengan mulus dikarenakan Perang Dingin (Sahashi, 2020). Agar meyakinkan Amerika Serikat bahwa Jepang tetap bersisi dengannya, Jepang mendeklarasikan posisinya dengan mengirimkan *Yoshida Letter* yang meyakinkan bahwa Jepang tidak ada niat untuk membentuk traktat bilateral dengan rezim komunis.

Amerika Serikat dan Cina kembali memiliki hubungan diplomatis meski ditengah perang dingin. Ini menyebabkan Jepang untuk menormalkan hubungan diplomatisnya dengan Cina di tahun 1972 dan mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat. Faktor ini menyebabkan Jepang berhasil menstabilkan kawasan Asia Timur dan mendukung perkembangan modernisasi *Cina* di berbagai sektor. Hubungan kedua negara menjadi dekat, mereka dengan cepat memperkuat hubungan bilateral dengan berkerjasama dalam berbagai proyek besar (Sahashi, 2020).

Hubungan mereka sangat kuat sehingga kritik negara-negara Eropa terhadap permasalahan hak asasi manusia di Cina, Jepang dan bahkan Amerika Serikat tetap mempertahankan hubungan dengan Cina. Tapi hubungan ini mulai memudar di tahun 1990an dimana setelah modernisasi Cina melejit pesat hingga *Cina* memiliki kekuatan nuklir serta aktifitas maritimnya disekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Hal ini diperparah dengan permasalahan sejarah yang seringkali dibawa-bawa ke berbagai isu, menjadikan hubungan kedua negara tidak seerat diawal selesainya Perang Dunia Kedua (Sahashi, 2020).

Ini bukan berarti Jepang memutuskan hubungannya dengan Cina, bahkan dengan adanya sengketa di Kepulauan Senkaku, Jepang tetap berusaha untuk memiliki hubungan diplomatis dengan negara tetangganya. Akan tetapi, Jepang mulai memikirkan opsi-opsi melalui padangan keamanan. Ini dikarenakan Cina dinilai telah berkembang pesat sehingga tidak bergantung dengan kawasan sekitar lagi dalam aktifitas negaranya, Jepang dan Cina menilai satu sama lainnya sebagai rival (Sahashi, 2020).

Meskipun dengan adanya halangan-halangan internasional terutama dari *Cina*, Jepang tetap tidak merubah tujuannya untuk menstabilkan kawasan Asia

Timur melalui cara-cara damai dan kerjasama. Tapi Jepang juga melihat bahwa ada potensi gesekan-gesekannya dengan Cina akan meletus dan mempengaruhi *Balance of Power* dikawasan Asia Timur, apalagi dengan persepsi publik diantara kedua negara yang cukup keras dalam menilai satu sama lain. Meski begitu, tetap ada harapan dari berbagai pihak bahwa hubungan kedua negara bisa kembali seperti sedia kala dan berkurangnya ketegangan diantara kedua negara (Sahashi, 2020).

Tabel 1.1 Perbandingan penelitian terdahulu

	Artikel 1 Christoper W. Hughes	Artikel 2 Andrew R. Capistrano	Artikel 3 Zeynab Farhadi	Artikel 4 Bjorn E. M. G.	Artikel 5 Ryo Sahashi
Topik Penelitian	Bagaimana cara Jepang merespon <i>Cina</i> dengan opsi militer	Perubahan posisi Jepang dalam pertahanan dan hubungan keamanan	Perubahan kebijakan luar negri Jepang dari pasif ke normal	Prioritas Jepang dalam peningkatan senjata dan regulasi pasukan pertahanan	Strategi Jepang dalam menempatk an posisinya diantara <i>Cina</i> dan Amerika Serikat
Teori Atau Konsep	Neo realisme	<i>Security Dilemma</i> dan <i>Uncertainty</i>	<i>Balance of Threat</i>	<i>Balance of Threat</i>	<i>Balance of Power</i> dan Diplomasi

Metode	Pendekatan Kualitatif, Metode Studi Dokumen, dan Teknik Analisis Deskriptif	Pendekatan Kualitatif, Metode Studi Dokumen, dan Teknik Analisis Deskriptif	Pendekatan Kualitatif, Metode Studi Dokumen, dan Teknik Analisis Deskriptif	Pendekatan Kualitatif, Metode Studi Dokumen, dan Teknik Analisis Deskriptif	Pendekatan Kualitatif, Metode Studi Dokumen, dan Teknik Analisis Deskriptif
Fokus Inti	Melihat perubahan respon Jepang dari diplomasi ke militer	Melihat perubahan posisi dengan adanya interpretasi kembali Artikel 9	Melihat perubahan cara Jepang menghadapi isu keamanan secara <i>internal</i> dan <i>external</i>	Melihat bagaimana Jepang berusaha untuk menyaingi <i>Cina</i> dalam segi senjata dan pasukan	Melihat bagaimana Jepang mempertahankan relasi dengan <i>Cina</i> meski beraliansi dengan Amerika Serikat
Kesimpulan	Jepang dinilai gagal oleh Neorealis karena responnya tidak sesuai skala ancaman	Perubahan dinilai tidak maksimal karena adanya Artikel 9	Jepang menganggap <i>Cina</i> dan Korea Utara sebagai ancaman yang sesuai teori	Perubahan iklim keamanan di Asia Timur menjadikan Jepang merubah	Jepang ingin menjaga kestabilan kawasan Asia Timur, bukan mendominasi

				prinsip keamanann	
Posisi Judul Peneliti an	Jurnal 1 memberikan gambaran akan usaha Jepang mengubah respon akan isu militer	Jurnal 2 memberikan gambaran akan terbatasnya tindakan Jepang akibat Artikel 9	Jurnal 3 memberikan gambaran akan upaya Jepang menyeimba ngkan ancaman di kawasannya	Jurnal 4 memberikan gambaran akan upaya Jepang menyaingi kekuatan Cina dari segi keamanan	Jurnal 5 memberikan gambaran akan posisi Jepang diantara Amerika Serikat dan Cina

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Peneliti berusaha meneliti perkembangan aliansi militer Jepang dengan Amerika Serikat melihat tiga aspek. Upaya Jepang melalui perkembangan persenjataan, kerjasama bidang militer dengan Amerika Serikat dan berbagai liku jalur yang ditempuh untuk menambahkan jumlah pasukan dan aset militer meski dengan adanya Artikel 9. Perkembangan terjadi dikarenakan *security dilemma* yang dialami Jepang dan Cina, dimana Jepang berusaha untuk menyelesaikan situasi tersebut dengan memperkuat dirinya serta mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat.

2.2 Landasan Teori dan Konseptual

Peneliti menggunakan teori *Balance of Power* oleh Kenneth Waltz dan konsep aliansi untuk membantu penelitian, teori dan konsep ini dinilai cocok dalam menjelaskan respon Jepang terhadap peningkatan militer Cina di tahun 2014 hingga 2022.

2.2.1 *Balance of Power Theory*

Penelitian ini menggunakan teori *Balance of Power* yang menjadi pondasi dari Realisme Klasik, teori penyeimbangan kekuatan yang digunakan disini adalah menurut Kenneth Waltz. Terdapat dua asumsi mengenai penyeimbangan kekuasaan, yang pertama adalah sistem internasional dunia ini bersifat anarki dengan tidak adanya sistem yang mengatur negara-negara. Negara harus membantu dirinya sendiri, agar dapat selamat disituasi yang tanpa kepastian. Asumsi kedua adalah negara tidak memiliki pemerintah yang mencakup seluruh dunia, sebuah badan untuk menjadi rujukan dalam mengambil keputusan dalam situasi bahaya. Ini yang menyebabkan negara akan mencoba menaikkan kapabilitasnya dengan memperkuat diri atau secara internal, atau mencari kekuatan yang bisa dipihak secara eksternal (Waltz, 1979).

Ini menyebabkan negara-negara di dunia akan merespon berbagai bentuk ancaman dengan dua cara, memperkuat dirinya atau mencari negara lain yang bisa diajak untuk menghadapi ancaman tersebut. Penguatan diri dari negara bisa dilakukan dengan upaya negara tersebut membangun kekuatan militer untuk mengimbangi kekuatan militer dari ancaman yang ada, sehingga negara tidak akan terlihat kalah jauh dari ancaman. Pencarian kekuatan yang bisa dipihak biasanya dicapai dengan membentuk aliansi, dengan menggabungkan kekuatan dari dua negara atau lebih maka diharapkan kekuatan yang telah terkumpul akan mampu menyaingi kekuatan dari ancaman yang ada.

Tidak ada definisi pasti dan banyak argumen mengenai penyeimbangan kekuatan itu sendiri. Akan tetapi terdapat beberapa kunci penting yang disetujui oleh berbagai pemikir mengenai metode penyeimbangan kekuasaan. Diantaranya adalah negara dalam penyeimbangan kekuasaan harus mengutamakan kedaulatan nasionalnya, transparan dalam tujuannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara aktor-aktor yang terlibat, membatasi konflik yang terjadi agar tidak tersebar lebih luas, serangan balik yang terbatas agar tidak menyebabkan siklus berulang, aliansi militer yang kuat antara negara terlibat dan perdagangan kuat yang akan membantu pesat dalam pertimbangan apakah negara akan terlibat konflik atau tidak (waldenu, n.d.).

2.2.1 Konsep Aliansi

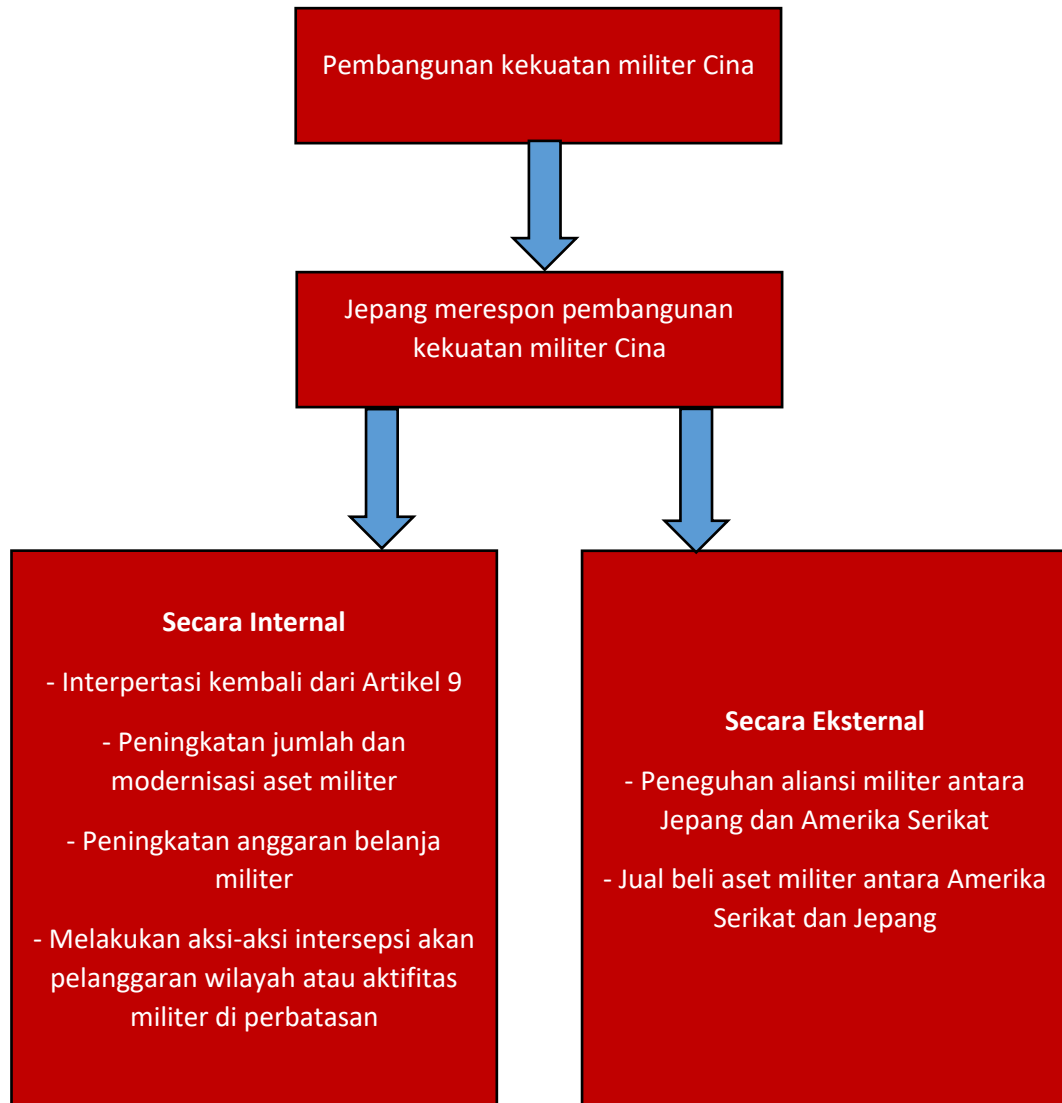
Alliance atau aliansi merupakan sebuah bentuk persetujuan antara dua negara atau lebih mengenai bantuan yang akan diberikan satu sama lain jika terjadi peperangan. Kerjasama ini biasanya berbentuk bertahan atau defensif, dimana negara yang terlibat aliansi diwajibkan membantu negara yang terkena serangan dari ancaman yang ada. Aliansi bisa bersifat tidak formal dalam implementasinya, akan tetapi aliansi bisa diformalkan melalui traktat militer yang diratifikasi oleh negara-negara yang terlibat (Britannica, 2023).

Aliansi sudah ada sejak lama, dan terbentuk secara alamiah sesuai dengan kondisi internasional yang ada. Tidak ada negara yang mampu mempertahankan hegemoninya selamanya, dikarenakan hegemoni yang ada akan selalu ditantang oleh kekuatan yang ada ataupun muncul. Aliansi merupakan salah satu upaya untuk memunculkan kekuatan tersebut, menggabungkan kekuatan yang ada untuk menahan atau mengalahkan hegemoni yang ada. Dengan tindakan ini, tidak ada negara yang mampu untuk mendominasi negara-negara lain dalam kurun waktu yang lama, menjadikan hegemoni serta dinamika internasional terus berubah-ubah sesuai dengan berjalannya waktu.

Aliansi memiliki berbagai skala, dari dimana anggotanya terbentuk dari dua negara terlibat atau berbagai negara dalam satu kelompok. Aliansi yang ada juga bisa bersifat defensif ataupun ofensif, dan terbentuk sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh negara-negara yang membentuk aliansi tersebut. Contoh yang bisa dilihat adalah dari saat perang dunia kedua. Terdapat aliansi militer poros yang beranggotakan Nazi Jerman, Italia dan Jepang yang bersifat ofensif dan aliansi militer sekutu yang bersifat defensif dan beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Cina.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif dengan sifat Interpretatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan melalui eksplorasi dan pemahaman terhadap individu atau kelompok dalam anggapannya dengan pemahaman sosial (Creswell, 2017). Penelitian ini bersifat *interpretative* yang berarti mengeksplorasi data-data yang biasanya berbentuk non numerik, memahami serta mengartikan data dari sumber narasi yang tidak bisa dikuantifikasi seperti perkataan, pernyataan resmi, gambar, video, dokumen dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti akan berupaya untuk menginterpretasi dan memahami respon dari pemerintah Jepang akan adanya kenaikan militer Cina.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian terletak pada respon Jepang terhadap perkembangan militer Cina sejak 2014 hingga tahun 2022, periode ini dipilih dikarenakan pada tahun tersebut, Artikel 9 diinterpretasi kembali oleh Pemerintah Jepang dan terjadi peningkatan jumlah pasukan dan aset militer Jepang. Dan ditahun 2022, Jepang mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk tetap membangun militernya selama lima tahun kedepan, menandakan pembangunan militer terbesar Jepang setelah perang dunia dua.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data sekunder dengan sumber data dokumen-dokumen yang terkait, pernyataan resmi, jurnal-jurnal penelitian, laporan tertulis dan portal berita. Sumber data yang bersifat kualitatif tidak hanya berbentuk teks tertulis, tapi juga dalam bentuk gambar, video ataupun artefak relevan. Menurut Lofland, sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2017).

3.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah *Library Research*, sebuah teknik yang mengumpulkan data-data dari literatur yang relevan dengan peningkatan aliansi militer Jepang dan Amerika Serikat, seperti sumber berita, pernyataan resmi, dokumen resmi, dan situs di internet yang membahas hal-hal mengenai topik tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa dilakukan secara induktif, membahas hal-hal yang khusus menjadi ke umum sebagai bentuk dari teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk menganalisa dan menarasikan permasalahan dengan data yang diperoleh, kemudian kombinasi tersebut akan dikaitkan dengan teknik dan konsep yang relevan. Miles dan Hubberman berkata bahwa teknik analisis data kualitatif mencakup beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Jepang dan Cina sepertinya akan terus berada di fase seperti sekarang ini, dimana kedua negara akan terus saling meningkatkan kekuatan, saling mengalami gesekan akan wilayah sengketa dan menjaga ketegangan militer diantara kedua negara. Namun belum ada tanda-tanda bahwa Cina dan Jepang akan mengalami konflik terbuka dimana angkatan bersenjata diantara kedua negara aktif bertempur melawan satu sama lainnya. Cina tidak akan menyerang Jepang secara langsung tanpa suatu alasan yang sangat kuat dan Jepang tidak akan menyerang Cina dikarenakan Artikel 9 dari konstitusinya, hal ini menjadikan kedua negara saling bersitegang tapi tidak dalam fase memasuki pertempuran terbuka.

Dengan situasi tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan kekuatan angkatan bersenjata Jepang dan penguatan aliansinya dengan Amerika Serikat akan menyebabkan Cina terus memantau perkembangan militer Jepang lebih jauh lagi, jika Jepang salah mengambil langkah dalam mengembangkan persenjataannya maka Cina bisa menuduh Jepang melanggar Artikel 9 dengan basis yang nyata dan hal ini akan menjatuhkan kredibilitas Jepang di mata negara-negara lain. Untuk menghindari hal tersebut, Jepang harus mengambil langkah yang sangat hati-hati dalam mengumumkan serta mengambil arah perkembangan dari persenjataan maupun kapabilitas tempur dari angkatan bersenjatanya.

Pengembangan militer Jepang akan terus terjadi selama ada ancaman nyata di wilayah perbatasannya, dan sulit untuk kembali mengurangi kekuatannya meskipun ancaman tidak lagi ada langsung di perbatasan. Akan tetapi Jepang lebih memungkinkan untuk terus berada dalam posisi ini, dikarenakan Cina yang dinilai mengancam Jepang tidak menunjukkan penurunan pembangunan militernya.

Amerika Serikat juga akan terus mempertahankan posisinya di Asia Timur, dengan mendekatkan dirinya kepada Jepang dan Korea Selatan. Jepang merupakan aset berharga bagi Amerika Serikat, sebagai mitra pertahanan dan konsumen produk-produk militer Amerika Serikat. Jepang bisa terus berada di kubu Amerika Serikat selama Amerika Serikat mampu memberikan Jepang perlindungan serta keamanan agar negaranya bisa terus terjaga dari potensi serangan. Persenjataan yang dijual Amerika Serikat juga merupakan bonus yang besar, dikarenakan kemudahan Jepang dalam mengakses produk militer yang bagus dari negara mitra pertahanannya.

5.2 Saran Peneliti

Peneliti menyarankan agar Jepang mulai membangun pos pertahanan di pulau-pulau terluar wilayahnya, untuk menjaga keamanan wilayahnya dari potensi serangan. Pangkalan militer atau pelabuhan militer akan lebih memperjelas perbatasan Jepang serta komitmen Jepang dalam mengamankan wilayahnya. Untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat, Jepang bisa menggunakan berbagai cara non militer dalam kerjasamanya sehingga kedua negara tidak hanya terjalin dalam traktat militer saja. Jepang dikenal dengan kemampuan robotiknya mungkin bisa membantu pengembangan teknologi Amerika Serikat, dimana kedua negara akan saling menguntungkan dengan adanya kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dapat memastikan kedua negara semakin erat dan akan sulit dipisahkan atau terbelah dalam menghadapi isu-isu yang ada.

Semakin tidak terpisahnya kedua negara, maka semakin besar peluang untuk Amerika Serikat memberikan dukungan penuh untuk Jepang dalam konflik terbuka. Jepang akan tetap dapat membangun kekuatan militernya dan sektor lain tanpa harus menjadikan Cina sebagai faktor utama, selama ada Amerika Serikat di kubu Jepang maka Jepang tetap berada dalam posisi yang aman ditengah ekspansi Cina dan tindakan provokatif militernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Britannica. 2023. (<https://www.britannica.com/topic/alliance-politics>)
- Capistrano, Andrew R. Kurizaki, Shuhei. *“Japan’s Changing Posture and Security Relations in East Asia”*, 2016.
- Auer, James E., *“Article Nine of Japan’s Constitution: From Renunciation of Armed Force ‘Forever’ to the Third Largest Defense Budget in the World”*. 1990.
- BBC. 2011. (<https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13693495>)
- CFR. (<https://www.cfr.org/japan-constitution/public-attitudes-on-revision>)
- CNBC. 2013. (<https://www.cnbc.com/id/100357515>)
- Cina Embassy. 2004 (<http://np.Cina-embassy.gov.cn/eng/CinaABC/zy/>)
- Creswell, John W, *Research Designs: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Defense News. Februari 2022. (<https://www.defensenews.com/smr/singapore-airshow/2022/02/17/japan-confirms-details-of-f-15j-upgrade-program-worth-56-billion/>)
- Drun, Jessica. Ccpwatch. *“One Cina, Multiple Interpretations”*. 2017. (<https://www.ccpwatch.org/single-post/2017/12/29/one-Cina-multiple-interpretations>)
- East Asia Forum. Februari 2022. (<https://www.defensenews.com/smr/singapore-airshow/2022/02/17/japan-confirms-details-of-f-15j-upgrade-program-worth-56-billion/>)

Eurasian Times. 2021 (<https://eurasianimes.com/japanese-navy-confronts-chinese-aircraft-carrier-liaoning-equipped-with-j-15-fighters-z-9-helicopters/>)

F-35.com. (<https://www.f35.com/f35/global-enterprise/japan.html>)

Fogel, Joshua. *“The Nanjing Massacre in History and Historiography”*. 2000.

Global Firepower. (https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=Cina)

Global Security. ([https://www.globalsecurity.org/military/world/japan/budget.htm#:~:text=In%20January%202013%20it%20was,4.77%20trillion%20\(%2454.3%20billion.\)](https://www.globalsecurity.org/military/world/japan/budget.htm#:~:text=In%20January%202013%20it%20was,4.77%20trillion%20(%2454.3%20billion.)))

Grønning, Bjørn Elias Mikalsen. *“Japan’s Shifting Military Priorities: Counterbalancing Cina’s Rise”*, Maret 2014.

Hirata, Keiko. *“Who shapes the National Security Debate? Divergent Interpretations of Japan’s Security Role”*. 2008.

Hane, Mikiso. *Eastern Phoenix: Japan Since 1945*. (Routledge), 2018.

Hughes, Christopher W. *“Japan’s ‘Resentful Realism’ and Balancing Cina’s Rise”*. 2015.

<https://www.britannica.com/topic/United-Front-Chinese-history-1937-1945>

Independent Record. (<https://worldjpn.net/documents/texts/JPCH/19511224.O1E.html>)

Jackson, Robert. Sorensen, George. *“Introduction to International Relations”*. 2013. New York, Oxford University Press. Inc.

Janes. 2020. (<https://www.janes.com/defence-news/news-detail/japan-begins-refitting-first-of-two-izumo-class-carriers-to-support-f-35b-operations>)

Japan Forward. 2022. (<https://japan-forward.com/after-jiang-zemin-japan-cina-relations-were-never-the-same/>)

Kapur, Nick. *“Japan At the Crossroads: Conflict and Compromise After Anpo”*. 2018. Cambridge. Harvard University Press.

Kim, Kyu Hyun. *The Sino-Japanese War (1894-1895): Japanese National Integration and Construction of the Korean "other"*.

Los Angeles Times. 8 September 1995
(<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-09-08-mn-43551-story.html>)

Mainichi. April 2019.
(<https://web.archive.org/web/20190421170114/https://mainichi.jp/english/articles/20190420/p2g/00m/0na/002000c>)

Ministry of Defense. (<https://www.mod.go.jp/gsdf/station/index.html>)

Ministry of Defense. (https://www.mod.go.jp/en/d_architecture/major-exercises/major_exercises_01.html)

Ministry of Foreign Affairs of Japan. 9 Desember 2010
(https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html)

Ministry of Foreign Affairs of Japan. 28 April 2015.
(https://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page3e_000334.html)

Naval News. 2019. (<https://www.navalnews.com/naval-news/2019/08/japan-officially-selects-f-35b-fighter-as-stovl-aircraft/> 2019)

Nippon. 31 Agustus 2016 (<https://www.nippon.com/en/features/h00146/>)

NPR. 2022. (<https://www.npr.org/2022/06/17/1105786322/Cinas-upgrades-its-naval-force-with-its-first-indigenous-aircraft-carrier?t=1655576217879>)

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2017, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Office of The Secretary of Defense. 2020 DOD Cina Military Power Report. 2020.

Pollman, Mina. *The Diplomat*. 2015.
(<https://thediplomat.com/2015/04/japans-increasingly-uncertain-security-environment/>)

Reuters. 2 Mei 2013 (<https://www.reuters.com/article/us-japan-politics-constitution-idUSBRE94101D20130502>)

Schlichtmann, Klaus. *“Japan in the World: Shidehara Kijuro, Pacifism and the Abolition of War”*. 2009. New York, Lexington Books.

Sahashi, Ryo. *“Japan’s Strategy Amid US-Cina Confrontation”* *Cina International Strategy Review*, 18 November 2020.

Sieg, Linda. Reuters. 2013 (<https://www.reuters.com/article/us-japan-politics-constitution-idUSBRE94101D20130502>)

Sipri.
(<https://www.sipri.org/commentary/topicalbackgrounder/2023/proposed-hike-japans-military-expenditure>)

South Cina Morning Post. 2017.
(<https://web.archive.org/web/20170310194710/http://www.scmp.com/news/Cina/article/2077732/Cinas-j-20-stealth-fighter-flies-fighting-forces-says-state-media>)

Stenly Djatah, Carmely Eucharisty, *“Dari Anarki Ke Hiraki: Eksposisi Gagasan Thomas Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme”*.

Stripes. 2021. (https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/2021-10-20/japan-fighter-jets-scramble-intercept-Cina-aircraft-3306498.html)

Stripes. 2022. (https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/2022-07-05/Cina-russia-japan-senkakus-6553027.html)

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, 2014, Bandung: Alfabeta.

The Constitution of Japan.
(https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html.)

The Cabinet Office of Japan. 2010. (<https://web.archive.org/web/20101022060139/http://www8.cao.go.jp/survey/h14/h14-bouei/2-6.html> 2010 Cabinet)

The Diplomat. 2015. (<https://thediplomat.com/2015/04/japans-increasingly-uncertain-security-environment/>)

The Diplomat. 2022. (<https://thediplomat.com/2022/12/japan-approves-26-3-increase-in-defense-spending-for-fiscal-year-2023/>)

The Guardian. 19 August 2012 (<https://www.theguardian.com/world/2012/aug/19/Cina-protest-japan-senkaku-diaoyo-island>)

The New York Times. 10 Oktober 1964 (<https://www.nytimes.com/1964/10/17/archives/japan-chides-Cina-for-defying-opinion-of-world-on-abomb.html>)

US Department of State. 2021. (<https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-japan/>)

USNI News. 6 September 2022. (<https://news.usni.org/2022/09/06/japan-to-build-two-massive-20000-ton-missile-defense-warships-indian-carrier-commissions>)

Waldenu. (<https://www.waldenu.edu/online-doctoral-programs/phd-in-public-policy-and-administration/resource/what-is-the-balance-of-power-and-how-is-it-maintained>)

Waltz, Kenneth. 1979. *“Theory of International Politics”*

Zeynab Farhadi, Bahareh Sazmand, Masoud Mousavi Shafaei and Mohsen Eslami, *“Regional Variables Influencing Japan’s Security Developments: 2012-2019”*